

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SEKOLAH
DASAR NEGERI 046 KOTA PEKANBARU MELALUI KARTU
INDONESIA PINTAR (KIP)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau

**Desi Wirana Purba
NPM : 157110598**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

**PEKANBARU
2019**

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SEKOAH DASAR NEGERI 46 KOTA PEKANBARU MELALUI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)

ABSTRAK

Desi Wirana Purba

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Program;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat obyektif Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Latar belakang penelitian ini adalah untuk melihat implementasi Program Indonesia Pintar yang di terapkan di Sekolah Dasar 46 kota pekanbaru berdasarkan fenomena-fenomena yang di temui dalam penerapan progrm tersebut. Indikator penilaian yang digunakan yaitu *komunikas, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi*. Tipe penelitian yang berlokasi di SD Negeri 46 Kota Pekanbaru ini adalah survey deskriptif, yaitu dalam pengumpulan data dan informasi peneliti melakukan observasi, wawancara, menyebarkan quisoner, serta melakukan dokumentasi. Responden yang peneliti cantumkan dalam penelitian ini ialah masyarakat yang merupakan orang tua murid yang meneima bantuan PIP di SD negeri 46 Kota Pekanbaru yang berjumlah sebanyak 27 orang dengan memberikan quisoner sementara untuk wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, staf pengurus PIP di SD 46 Kota pekanbaru, beserta staf kesiswaan bidang SD di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang menjadi narasumber untuk pelengkapan informasi yang dibutuhkan. Data-data yang dikumpulkan, dibandingkan, serta dianalisis dengan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah cukup terlaksana dalam hal *komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi*.

**THE IMPLEMENTATION OF A SMART INDONESIA PROGRAM AT
PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL 46 CITIES PEKANBARU THROUGH A
SMART INDONESIA CARD**

ABSTRACT

Desi Wirana Purba

Keywords: Implementation, Policy, Program;

This study aims to determine the objective level of Implementation of the Smart Indonesia Program in the 46 Public Schools of Pekanbaru City through the Smart Indonesia Card (KIP). The background of this research is to look at the implementation of the Smart Indonesia Program which was implemented in 46 elementary schools in Pekanbaru city based on the phenomena encountered in the application of the program. The assessment indicators used are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This type of research, located in SD Negeri 46 Pekanbaru City is a descriptive survey, which is in collecting data and information researchers conduct observations, interviews, distribute quisoners, and do documentation. The research respondents included in this study were the parents of the students who received PIP assistance at 46 public elementary schools in Pekanbaru City, totaling 27 people by providing temporary quisoners for interviews with the school principal, PIP management staff at SD 46 Kota Pekanbaru, along with elementary student student staff in the Pekanbaru City Education Office who became the resource person for completing the information needed. The data collected, compared, and analyzed with descriptive statistical analysis. The results showed that the implementation of the Smart Indonesia Program in the 46 elementary schools in Pekanbaru through the Smart Indonesia Card (KIP) was already sufficient in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya pada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena berkat limpahan kasih karunia-NYA, serta kemurahan dan kasih setianya sehingga penulis dapat merampung penyelesaian Skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip)”**. Yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau .

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk setiap lembar, bab perbab dalam Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafriadi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

4. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya.,M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan selalu mendukung, menyemangati serta mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si yang juga selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran serta selalu memotivasi dan juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini serta menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
7. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian usulan penelitian ini.
8. Ibu Nila Wardani, S.Pd selaku Kepala sekolah beserta seluruh jajaran guru yang turut membantu dalam memberikan data dan informasi serta saranan masukan untuk kebutuhan penelitian.

9. Kepada Dinas Pendidikan terkhusus Staf Kesiswaan bagian SD yang turut membantu memberikan informasi tentang program yang peneliti teliti.
10. Kepada Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bapak W. purba dan Ibunda Ibu N. Siregar yang telah memberikan dukungan, nasihat, doa serta materil. Serta kepada seluruh adik-adik ku yang tersayang Ezra Febriyani, Exaudi Riau Naldo, Lestari, Joel, Michael yang telah memberikan motivasi penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.
11. Teman-teman seangkatan program studi Administrasi Publik angkatan 2015. Teman-teman kelas AP B yangtak dapat disebutkan satu persatu dan yang terkhusus untuk para sahabat ku 7 Item Rika Ardila, ETTY Erawati, Irma Vemiliani S. Ap, Netty Wulansari, Rani Maharani, Ria Safitri S. Ap dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu semuanya yang selalu membuat hari-hari perkuliahan menjadi menyenangkan.
12. Kepada Dongan magodang, Lisnia pibriani, Mesra lusiana A.md , Desfita Lispa, SE, Murni Tricando Gultom., Amd.AK, Siska Uli, Juliarti, Christ Diana Bahana, Fatisa Veronica, dan Anugrah Suryani yang turut serta memberikan masukan-masukan dan memberikan dukungan moral sehingga penulis bisa bersemangat dalam menempuh dunia perkuliahan.

Semoga tuhan memberikan pahala atas jasa dan kebaikan mereka semua. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis harapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Amin.

Pekanbaru, 15 Agustus 2019
Penulis

Desi Wirana Purba



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSEJUTUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian	19
2. Manfaat Penelitian	19
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	21
A. Studi Kepustakaan	21
1. Konsep Administrasi.....	21
2. Konsep Organisasi	24
3. Konsep Manajemen.....	25
4. Konsep Kebijakan Public.....	27
5. Konsep Implementasi.....	29
6. Konsep Program.....	31
7. Konsep Program Indonesia Pintar.....	33
B. Kerangka Pikir	33
C. Hipotesis.....	35
D. Konsep Operasional	35
E. Konsep Operasional Variabel	37

F. Teknik Pengukuran	38
BAB III : METODE PENELITIAN.....	42
A. Tipe penelitian.....	42
B. Lokasi penelitian	43
C. Populasi dan sampel.....	43
D. Teknik penarikan sampel	44
E. Jenis dan sumber data.....	45
F. Teknik pengumpulan data.....	45
BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Provinsi Riau.....	49
B. Gambaran Umum Pekanbaru	52
1. Kependudukan	53
C. Gambaran umum SD Negeri 46 Kota Pekanbaru	52
1. Profil tempat penelitian	53
2. Visi dan misi.....	55
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
1. Identitas	59
2. Analisis Implementasi Program Indonesia Pintar Disekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).....	62
BAB VI PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR KEPUSTAKAAN	77
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Table	Halaman
I.1 : Jumlah Sasaran Program Indonesia Pintar Tahun 2017	15
I.2 : Data Jumlah Murid Yang Mendapatkan Bantuan Program Indonesia Pintar Disekolah Dasar 46 Kota Pekanbaru Tahun 2014 Sampai Tahun 2018.....	18
ii.1 : Oprasional Variabel Penelitian Tentang Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip)	37
iii.1 : Populasi Dan Sampel Penelitian Tentang Penelitian Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip)	44
Iv.1 : Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kelamin Di Kota Pekanbaru.....	53
Iv.2 : Sarana Dan Prasarana Sd Negeri 46 Kota Pekanbaru	54
Iv.3 : Jumlah Murid Kelas 1 Sampai Kelas 6 Dari Tahun 2016 Sampai Tahun 2019.....	55
Iv.4 : Tenaga Pengajar Atau Guru Yang Mengajar Di Sd Negeri 46 Kota Pekanbaru.....	57
V.1 : Jenjang Pendidikan Responden.....	60
V.2 : Jumlah Responden Berdasarkan Umur	61
V.3 : Jumlah Responden Berdasarkan Jebis Kelamin.....	61
V.4 : Tanggapan Dari Responden Yaitu Orang Tua Murid Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar Mengenai Komunikasi Dalam Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar 46 Kota Pekanbaru.....	65
V.5 : Tanggapan Dari Responden Yaitu Orang Tua Murid Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar Mengenai Sumber Daya Dalam Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar 46 Kota Pekanbaru.....	68

V.6	:	Tanggapan Dari Responden Yaitu Orang Tua Murid Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar Mengenai Disposisi Dalam Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar 46 Kota Pekanbaru.....	69
V.7	:	Tanggapan Dari Responden Yaitu Orang Tua Murid Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar Mengenai Struktur Birokrasi Dalam Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar 46 Kota Pekanbaru.....	71
V.8	:	Rekapitulasi Dari Jawaban Responden Tentang Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sd 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip)	73



DAFTAR GAMBAR

Table		Halaman
I.1	Alur Mekanisme Penyaluran Pip.....	14
I.2	Perentase Penerima Kartu Kip Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru	17
Ii.1	Kereangka Pikirsn Tentang Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sd Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip).....	34
Iv.1	Peta Geografi Kota Pekanbaru Provinsi Riau.....	51
Iv.2	Struktur Organisasi Sd Negeri 46 Kota Pekanbaru...	

BAB I

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pendidikan berlangsung seumur hidup, dari sejak dalam kandungan, kemudian melalui seluruh proses dan siklus kehidupan manusia. Oleh karenanya secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pembangunan pendidikan merupakan wahana untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya.

Secara filosofi tanggung jawab pendidikan melekat pada keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks kenegaraan pendidikan merupakan hak setiap warga Negara, maka sebagaimana hal tersebut memaknakan bahwa Negara berkewajiban memberikan layanan pendidikan kepada warganya.

Pada tahun 2010, Kementerian Pendidikan Nasional, menetapkan misi 5 tahun ke depan (2010-2015) dengan lima hal yang menjadi fokus perhatian. Kelima fokus yang dinamai lima K, yakni Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas/Mutu dan Relevansi. Kesetaraan serta kepastian diharapkan membuat jalan dalam peningkatan pelayanan pendidikan berbagai jenjang yang ada.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi untuk menerapkan kebijakan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun. Salah satunya adalah dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 62 PP disebutkan bahwa :

1. Pembinaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal;
2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya manusia, dan model kerja tetap;
3. Biaya personal sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pada saat ini pemerintah Indonesia sangat serius dalam meningkatkan taraf pendidikan bangsa Indonesia dengan terus mengupayakan program-program yang membantu masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan dengan mudah terlebih kepada masyarakat miskin dan rentan kemiskinan.

Kerjasama yang harmonis sangat dibutuhkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia sebagaimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan pasal 1 ayat 7 yaitu :

“tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan memertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan”

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Yang dituli dalam Bab II pasal 3 yang berbunyi

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

“pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, masyarakat.”

Konsekuensi dari amanat Undang-Undang itu adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan pada seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan atas.

Pendidikan merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, Negara (Pemerintah) sebagai pengemban amanah rakyat bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman.

Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Dengan perkembangan kebudayaan manusia, timbulah tuntutan akan adanya pendidikan yang terselenggara lebih baik, lebih teratur dan didasarkan atas pemikiran yang matang. Manusia ingin lebih mempertanggungjawabkan caranya dia mendidik generasi penerusnya agar lebih berhasil dalam melaksanakan hidupnya, dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia serta dalam hubungannya dengan Tuhan. Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan

nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupannya dan sekaligus untuk perbaikan nasib dan peradaban umat manusia.

Menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya pasal 3 ayat (5)

“penetapan kebijakan penerimaan siswa dan mahasiswa yang berasal dari masyarakat minoritas terbelakang dan atau tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah”.

Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang serta Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali. Pendidikan merupakan suatu cara untuk memutuskan rantai kemiskinan, melalui pendidikan yang mencukupi seseorang dapat hidup dengan layak seperti yang diharapkan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu warisan nilai yang nantinya nilai tersebut akan menjadi

penolong dan penentu bagi seseorang untuk menentukan jalan hidupnya kedepan dan sekaligus sebagai perbaikan nasibnya.

Setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan dan merasakan pendidikan, namun belum semua warga Negara Indonesia mampu mengakses pendidikan tersebut sehingga kebijakan pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Salah satu faktor yang tidak mendukung terselenggaranya pendidikan di semua lapisan masyarakat Indonesia ialah kemiskinan.

Masyarakat kurang mampu sering diartikan sebagai masyarakat miskin karena tidak dapat memenuhi standar hidup. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi perekonomiannya serta standar hidup di masyarakat. Kondisi ini dapat digambarkan dari rendahnya pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik itu sandang, pangan, papan. Pada prinsipnya standar hidup dalam suatu masyarakat bukan hanya berdasarkan pemenuhan sandang, pangan, papan, akan tetapi terpenuhinya juga kebutuhan akan kesehatan atau pun pendidikan, tempat tinggal atau pemukiman yang layak.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menggunakan kriteria kesejahteraan keluarga untuk mengukur lima pengelompokan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut :

a. Keluarga pra sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasar (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, kesehatan

b. Keluarga sejahtera tahap I

Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, indikator yang digunakan yaitu:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut
2. Pada umumnya setiap anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja, atau sekolah dan berpergian.
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan tanah.
5. Bila anak sakit atau pasangan subur ingin berKB dibawa kesarana atau petugas kesehatan.

c. Keluarga sejahtera tahap II

Keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologi 6 sampai 14, yaitu:

6. Anggota keluarga melakukan ibadah secara teratur
7. Paling kurang sekali seminggu anggota keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk.
8. Seluruh anggota keluarga paling tidak menerima satu stel pakaian baru per tahunnya.
9. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
10. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
11. Paling kurang 1 (orang) keluarga yang berumur 15 tahun keatas yang mempunyai penghasilan tetap.
12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun dapat membaca tulisan latin.
13. Seluruh anak usia 5-15 tahun sekolah pada saat ini.
14. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan subur memakai KB kecuali yang sedang hamil.

d. Keluarga sejahtera tahap III

Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1-14 dan dapat juga memenuhi syarat 15-21, syarat pengembangan keluarga yaitu :

15. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
16. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan.
17. Biasanya makan bersama paling kurang satu kali sehari dan kesempatan itu digunakan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
18. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat, dilingkungan tempat tinggalnya.
19. Melakukan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/ 6 bulan.
20. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
21. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat

e. Keluarga sejahtera tahap III plus.

Keluarga sejahtera tahap III plus yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria 1 sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pembangunan keluarga yaitu :

22. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan suka rela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
23. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.

Kemiskinan menjadi factor utama yang menjadikan pendidikan tersebut tidak dapat dirasakan oleh sebagian orang. Pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah utama bagi masyarakat tidak mampu atau miskin terutama bagi masyarakat lapisan menengah kebawah, mereka merasa tidak mampu mengikuti proses pendidikan yang tidak sesuai dengan kemampuan finansialnya. Mahalnya biaya pendidikan salah satunya dapat dirasakan apabila sudah memasuki jadwal pembelajaran setiap murid diharuskan memiliki buku cetak dan buku LKS, iuran sekolah, alat tulis, seragam (bagi murid baru), sementara lain halnya dengan biaya diluar sekolah seperti biaya transportasi, uang saku, dan biaya kusus tambahan. Hal ini lah yang menjadi salah satu factor ketidak mampuan masyarakat menengah kebawah dalam mengakses pendidikan yang mahal.

Dalam Permendiknas Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya pada Satuan Dasar dan Menengah Pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 dan pasal 3 yaitu berbunyi :

Pasal 2

- (1) Biaya pendidikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan/atau Anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Biaya pendidikan pada sekolah pelaksana program wajib belajar menjadi tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah sampai tepenuhinya SNP.
- (3) Pemenuhan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bantuan operasional sekolah.

Pasal 3 “sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, atau walinya”

Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin kejenjang yang lebih tinggi, terutama disebabkan oleh banyaknya putus sekolah dan angka tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi hingga SMA/SMK.

Disisi lain pemerintah sendiri belum mampu menyediakan pendidikan yang sepenuhnya gratis seperti yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya ketidak mampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut maka pemerintah pun memberikan solusi lain dengan menerbitkan program-program yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan dalam pendidikan bagi anak-anak yang dalam bangku sekolah.

Upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat terus berjalan melalui program-program yang

dirancang oleh pemerintah hingga saat ini. Salah satu program yang dirancang pemerintah untuk masyarakat agar dapat mengakses pendidikan ialah melalui PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP), program Indonesia pintar merupakan program pemerintah dengan memberikan bantuan uang tunai kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia pintar ini bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 tahun, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan (sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya atau balai latihan kerja).

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan direktorat teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan

kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, lembaga penyalur dan instansi terkait lainnya. Adapun peran dan fungsi dari pelaksana Program Indonesia Pintar yaitu:

DIREKTORAT TEKNIS

Direktorat teknis pengelola PIP adalah: (a) Direktorat Pembinaan SD; (b) Direktorat Pembinaan SMP; (c) Direktorat Pembinaan SMA; (d) Direktorat Pembinaan SMK; (e) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; dan (f) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Peran Dan Fungsi Direktorat Teknis Adalah:

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan PIP;
2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP;
3. Mendorong satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi untuk proaktif mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan datanya ke dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima manfaat/dana PIP;
4. Melakukan identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data siswa calon penerima PIP dari usulan sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan dengan aplikasi Dapodik;
5. Melakukan identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data peserta didik/warga belajar Paket Kesetaraan A/B/C dan peserta didik kursus dan pelatihan calon penerima PIP dari usulan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
6. Menetapkan daftar penerima PIP dalam bentuk Surat Keputusan (SK) direktur teknis terkait;
7. Menginformasikan SK dan daftar peserta didik penerima PIP kepada siswa melalui sekolah/lembaga/dinas pendidikan kabupaten/kota/ provinsi.
8. Menetapkan bank/lembaga penyalur dana PIP;
9. Mencetak dan mengirimkan Kartu Indonesia Pintar (KIP);
10. Melakukan pemantauan implementasi PIP;
11. Melayani pengaduan masyarakat terkait dengan PIP;
12. Menyusun laporan pelaksanaan PIP.

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

Peran dan fungsi dinas pendidikan provinsi adalah:

1. Mensosialisasikan program PIP kepada seluruh UPTD dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, sekolah dan masyarakat di wilayahnya;

2. UPTD dinas pendidikan provinsi/kepala wilayah bersama dengan dinas kabupaten/kota mendorong sekolah untuk proaktif mendata anak usia sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) yang tidak bersekolah agar bersekolah;
3. Mendorong satuan pendidikan SMA dan SMK dan satuan pendidikan nonformal SKB/PKBM/LKP untuk proaktif mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan datanya ke dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana/manfaat PIP;
4. Mendorong kepala sekolah dan pimpinan/kepala SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya untuk mengidentifikasi dan melaporkan anak usia sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) sesuai prioritas sebagai calon penerima dana/manfaat PIP;
5. Menginformasikan/menyampaikan Surat Keputusan (SK) dan Daftar Peserta Didik Penerima PIP kepada siswa penerima melalui sekolah/ lembaga;
6. Membantu mengkoordinasikan dengan bank/lembaga penyalur untuk penjadwalan pencairan/pengambilan dana PIP oleh peserta didik penerima;
7. Menetapkan petugas/tim data/manajemen PIP tingkat provinsi (jenjang SMA dan SMK);
8. Ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan implementasi PIP sesuai dengan petunjuk pelaksanaan;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PIP sesuai dengan petunjuk pelaksanaan;
10. Menangani pengaduan dari sekolah dan masyarakat terkait dengan PIP.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Peran dan fungsi dinas pendidikan kabupaten/kota adalah:

1. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP kepada seluruh satuan pendidikan formal, satuan pendidikan nonformal, dan masyarakat di wilayahnya;
2. Memantau dan mendorong satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal untuk proaktif mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan datanya ke dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima PIP;
3. Mendorong kepala sekolah dan pimpinan/kepala SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal untuk mengidentifikasi dan melaporkan anak usia sekolah (6 sampai dengan 18 tahun) sesuai prioritas sebagai calon penerima PIP.
4. Menetapkan petugas/tim data/manajemen PIP tingkat kabupaten/kota (jenjang SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C, dan Kursus dan Pelatihan);
5. Menyetujui usulan siswa calon penerima dari sekolah dan satuan pendidikan nonformal setelah data terverifikasi;
6. Menyampaikan/meneruskan usulan siswa calon penerima dari sekolah melalui aplikasi pengusulan PIP (SD dan SMP) dan usulan dari satuan pendidikan nonformal ke direktorat teknis terkait;

7. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau UPTD dinas pendidikan provinsi menyampaikan/meneruskan data usulan di Dapodik sekolah (SMA dan SMK), dan usulan dari satuan pendidikan nonformal ke direktorat teknis terkait;
8. Mengesahkan usulan dari pimpinan/kepala SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal, setelah data terverifikasi. Selanjutnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
9. Menginformasikan/menyampaikan Surat Keputusan (SK) dan Daftar Peserta Didik Penerima PIP kepada siswa penerima melalui sekolah/ lembaga;
10. Mengkoordinasikan dengan bank/lembaga penyalur untuk penjadwalan pencairan/pengambilan dana PIP oleh peserta didik penerima;
11. Monitoring dan evaluasi implementasi PIP;
12. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan PIP;
13. Mensosialisasikan PIP pada lembaga satuan pendidikan nonformal yang terdapat pada laman: paud-dikmas.kemdikbud.go.id

Sekolah/Lembaga Pendidikan

Peran dan fungsi sekolah/lembaga pendidikan adalah:

1. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP ke seluruh warga sekolah;
2. Sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) pemilik KIP yang tidak bersekolah sebagai calon peserta didik/warga belajar pada saat rentang pelaksanaan PPDB dan harus diusulkan sebagai calon penerima dana/manfaat PIP.
3. Mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan (updating) data peserta didik calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar;
4. Mengidentifikasi, menseleksi, mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang tidak memiliki KIP sesuai dengan sasaran prioritas dan memutakhirkan (updating) data peserta didik sebagai calon penerima dana PIP ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar;
5. Menyampaikan data usulan calon penerima dana PIP baik peserta didik pemilik KIP dan atau tidak ber KIP kepada dinas kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi sesuai kewenangannya;
6. Menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana PIP telah siap diambil;
7. Bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik yang diusulkan sebagai calon penerima dana PIP.
8. Membuat Surat Keterangan Kepala Sekolah sebagai persyaratan pencairan dana oleh peserta didik di bank/lembaga penyalur dan/atau menyiapkan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan;
9. Melaksanakan pencairan dana PIP yang dilakukan secara kolektif sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;

10. Memberikan pengarahan kepada peserta didik penerima dana PIP perihal ketentuan pemanfaatan dana;
11. Memantau proses pencairan dana PIP di bank/lembaga penyalur; j. Mendata/melaporkan peserta didik yang sudah mencairkan dana PIP ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi sesuai kewenangannya.

Peran Dan Fungsi Lembaga Pimpinan Skb/Pkbn/Lkp Atau Satuan Pendidikan Nonformal Lainnya Adalah:

1. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP kepada seluruh peserta didik;
2. Menseleksi dan mengusulkan peserta didik Paket Kesetaraan A/B/C, kursus dan pelatihan calon penerima dana PIP sesuai dengan mekanisme;
3. Menyampaikan informasi kepada peserta didik Paket Kesetaraan A/B/C, kursus dan pelatihan penerima bahwa dana PIP telah siap diambil;
4. Membuat surat keterangan pimpinan SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya sebagai persyaratan pengambilan dana oleh peserta didik di lembaga penyalur;
5. Memberikan pengarahan kepada peserta didik Kejar Paket Kesetaraan A/B/C, kursus dan pelatihan penerima dana PIP perihal ketentuan pemanfaatan dana;
6. Memantau proses pengambilan/pencairan dana PIP di lembaga penyalur;
7. Lembaga wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) pemilik KIP yang tidak bersekolah sebagai calon peserta/warga belajar untuk diusulkan sebagai calon penerima dana PIP.

Pelaksanaan PIP banyak melibatkan lembaga-lembaga berwenang seperti yang dijelaskan diatas, mulai dari Direktorat Teknis, Dinas Pendidikan Provinsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Sekolah/Lembaga Pendidikan. Alur pelaksanaan PIP dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1 Alur Mekanisme Penyaluran PIP



Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar ini merupakan kelanjutan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan siswa/warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar (PKBM)/ lembaga kursus dan pelatihan dari rumahtangga/ keluarga dengan status ekonomi terendah secara nasional

Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja.

Adapun sasaran dari program Indonesia pintar ini ialah Peserta Didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan:

1. Peserta didik pemilik KIP;
2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
 - a. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - b. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - c. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
 - d. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
 - e. Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah
 - f. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
 - g. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Ada pun sasaran PIP adalah sebanyak 16.487.872 peserta didik dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.1 jumlah sasaran Program Indonesia Pintar tahun 2017

Jenjang Pendidikan	Sasaran PIP
SD/Paket A	9.528.732
SMP/Paket B	4.019.090
SMA/Paket C	1.243.415
SMK/Kursus dan Pelatihan	1.696.635
Jumlah	16.487.872

Sumber Data : Petunjuk Plaksana PIP, 2017

Target penerima Bantuan Siswa Miskin/ Program Indonesia Pintar untuk Sekolah dasar pada tahun ajaran 2016/2017 seperti yang tertera pada tabel diatas adalah sebanyak 9.528.7322 siswa miskin. Besaran dana PIP diberikan per peserta didik, adalah sebagai berikut:

Sekolah Dasar (SD)/Paket A:

- a. Peserta didik Kelas I, II, III, IV dan V Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00;
- b. Peserta didik Kelas VI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00;
- c. Peserta didik Kelas II, III, IV, V dan VI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00
- d. Peserta didik Kelas I Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00

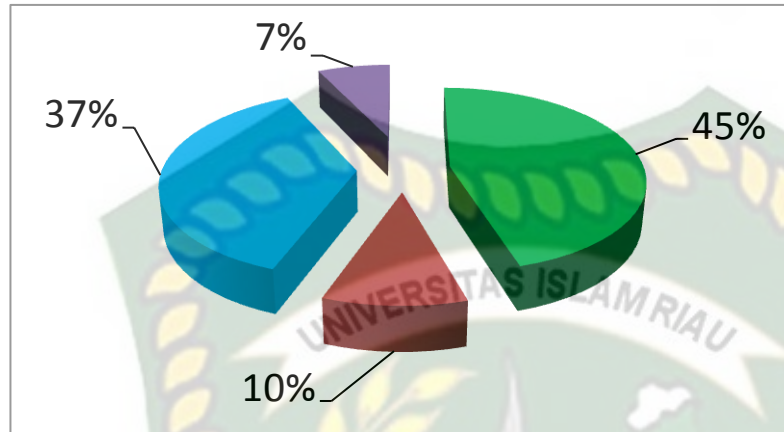
Pemanfaatan Dana PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik di sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya, untuk pemanfaatan sebagai berikut:

1. Membeli buku dan alat tulis;
2. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
4. Uang saku peserta didik;
5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;
6. Biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal

Penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana PIP untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan. Program Indonesia Pintar ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telah bergulir sejak tahun 2008.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Sekolah Dasar Negeri 046 pekanbaru, perentase penerima kartu KIP di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru ialah :

Gambar 1.2 perentase penerima kartu KIP di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru



Sumber Data : Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru

- Penerima kartu indonesia pintar (KIP) sebanyak 37%
- Penerima kartu keluarga sejahtera (KKS) sebanyak 7%
- Penerima kartu perlindungan sosial (KPS) sebanyak 10%
- Diusulkan layak mendapatkan PIP sebanyak 45%

Dari persentase diatas menunjukkan masih banyaknya anak murid yang layak diusulkan mendapatkan bantuan program Indonesia pintar namun belum terdaftar dalam program Indonesia pintar. Sementara tujuan dari program Kartu Indonesia Pintar tersebut adalah untuk membantu siswa miskin memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka.

Table 1.2 Data jumlah murid yang mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar 046 Kota Pekanbaru tahun 2014 sampai tahun 2018

KELAS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
1	6	2	24	19
2	7	11	14	4
3	3	17	-	7
4	4	8	10	12
5	11	8	13	4
6	29	17	-	5

Sumber : Data Olahan peneliti, 2018

Melihat table diatas menunjukkan bahwasannya implementasi program Indonesia pintar di SD N 046 Pekanbaru berdasarkan data yang diperoleh dari pihak sekolah masih terdapat ketidakjelasan dalam pendataan murid yang mendapatkan bantuan PIP, dari data yang peroleh menunjukkan bahwasannya terdapat murid dari kelas 3 dan 6 yang tidak mendapatkan bantuan PIP pada tahun 2016/2017, berdaarkan ketidaksesuain antara peraturan yang menaungi program dengan implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 046 Pekanbaru tersebut maka fenomena yang ditangkap oleh penulis :

1. Banyak orang tua murid yang menerima bantuan proram ini mengeluhkan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan staf pengurus PIP di SD Negeri 46 pekanbaru, sehingga mereka hanya memperoleh informasi sekedarnya saja dari petugas TU yang ada padasaat meminta surat pengantar ke BANK
2. Adapun yang menjadi kendala dalam program ini ialah ketidak jelasan penerimaan bantuan yang diterima murid, dilihat dari data yang dipeoleh bahwasannya masih ada ketidak jelasan penetapan murid yang menerima

bantuan dari tahun 2016 hingga 2018 terdapat nama-nama yang mendapatkan bantuan di tahun 2016 tetapi tidak mendapatkan bantuan di 2017.

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah belum terealisasi secara optimal sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip)”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan dalam usulan penelitian ini yaitu **“Bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip)”**

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program KIP pada Sekolah Dasar Negeri 046 di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dari pelaksanaan program KIP

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis, akademis dan empirisnya adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam hal kebijakan publik.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan khususnya bagi Kepala Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, pegawai, dan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan sebuah program.
- c. Secara Akademis, dapat menjadikan salah satu bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Secara istilah, administrasi merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Karena memang pada awalnya, administrasi merujuk kepada pekerjaan yang berkaitan dengan pengabdian atau pelayanan kepada raja atau menteri-menteri dalam tugas mengelola pemerintahannya.

Dalam buku karangan Sondang P. Siagian, administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi tersebut. *Pertama*, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak ada. *Kedua*, administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Sekarang ini, konsep administrasi telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga administrasi mengalami perluasan konotasi. Secara garis besar, pengertiannya antara lain mempunyai pengertian sama dengan manajemen, mendorong pada produktivitas kerja, pemanfaatan SDM, dan sumber daya lain

(uang, material, metode) secara terpadu, pencapaian pada tujuan melalui orang lain, dan fungsi eksekutif pemerintah.

Istilah administrasi secara bahasa, administrasi berasal dari kata *ad* dan *administrae*, yang berarti “membantu, melayani atau memenuhi”. Di Indonesia kita mengenal dan emaham “administrasi” dari dua bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. *Pertama*, *administrae* dari bahasa Belanda yang kita kenal sejak awal masuknya engaruh sistem Administrasi publik klasik (sistem Administrasi Negara Prancis atau sistem Administrasi Negara Eropa Barat Kontingental) yang dibawa oleh pemeritah jajahan belanda.

Istilah *administratie* dalam bahasa belanda mencakup ppengertian *stelselmatige verkrijging en verweking van gegevevs* (dalam bahasa indonesia disebut “tata usaha” atau administrasi dalam arti sempit”) administrasi sebagai ketatausahaan yang dalam bahasa inggris dipergunakan istilah *clerical work*, *paper work*, atau *ofice work* atau administrasi dalam arti sempit ialah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberi nomor/kode surat, pengetikan, peggandaan penyimpanan (pengarsipan), pengiriman berbagai informasi yang diterima atau dikeluarkan oleh suatu organisasi/indusrti.

Menurut Siagian (2006;7) ditinjau dari perkembangannya,administrasi dapat di bagi atas dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Administrasi Negara (*public administration*)
2. Administrasi privat (*private administration*)

D. white (dalam syafri 2012:9) “*aministration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale*”

“administrasi adalah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha, kelompok, public atau privat, sipil atau militer, besar atau kecil”

Menurut Siagian (dalam Syafri 2012;9) Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa administrasi adalah sebagai suatu proses kerjasama sekurangnyanya dua orang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tersebut diperlukan adanya suatu wadah yang disebut dengan organisasi.

Menurut Andry dan TarmiziYussa (2015;11) Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antaradua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari batasan tentang administrasi ini terkandung beberapa makna yaitu :

1. Admisitrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak ada.
2. Administrasi mempunyai suatu unsur-unsur tertentu yaitu adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu (waktu, tempat, peralatan, materil, dll).
3. Administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal baru karena ia telah timbul bersama dengan timbulnya peradaban manusia.

Menurut Zulkifli (2005;23) pekerjaan pokok yang dimaksud mencakup unsure-unsur umum administrasi dalam perspektif poses. Adapun unsure-unsur umum administrasi tersebut meliputi :

- a. Organisasi (tata keragaan)
- b. Manajemen (tata pimpinan)
- c. Komunikai (tata hubungan)
- d. Informasi (tata keterangan)
- e. Personalia (tata kepegawaian)
- f. Financial (tata keuangan)
- g. Material (tata pembekalan)
- h. Relasi public (tata humas)

2. Konsep Organisasi

Menurut Griffin (dalam Saefullah dan Ernie Tisnawati 2012;5) organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.

Organisasi menurut Daft (dalam priansa dan agus garnida 2015;61) sebagai entitas sosial yang diatur oleh tujuan,didesain secara sengaja berupa sistem aktivitas yang terstruktur dan terkoordinasi, dan berhubungan dengan lingkungan eksternalnya.

Siagian (dalam Andry, 2015;14) yang menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Zulkifli dan Nurmasari (2015:99) organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas

diantara para anggota untuk mencapai tujuan. Organisasi dapat didefinisikan sebagai :

1. Organisasi dalam artian badan yaitu kelompok orang yang berkerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Organisasi dalam artian bagan yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi

1. Adanya tujuan bersama.
2. Adanya kerjasama dua orang atau lebih.
3. Adanya pembagian tugas.
4. Adanya kehendak untuk bekerjasama.

Menurut Soffer (dalam solihin 2009;91) organisasi adalah persekutuan/perkumpulan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja di mana pekerjaan (yang terdapat dalam organisasi tersebut) dipilah-pilah menjadi tugas dan dibagikan kepada para pelaksana tugas/pemegang jabatan untuk mendapatkan satu kesatuan hasil.

Jones dan George (dalam solihin 2009;99) menyebutkan adanya empat faktor yang mempengaruhi pemilihan struktur organisasi oleh sebuah organisasi. Keempat faktor tersebut adalah lingkungan organisasi (*organizational environment*), strategi (*strategy*), teknologi (*technology*), dan sumber daya (*human resources*)

3. Konsep Manajemen

Dalam mengartikan dan mendefinisikan manajemen ada berbagai ragam, ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, manajemen, pengurus dan lain

sebagainya. Pengertian manajemen menurut manulang (dalam zulkifki dan nurmasari 2015;4) dapat dilihat dari tiga pengertian :

1. Manajemen sebagai **suatu proses**
2. Manajemen sebagai suatu **kolektivitas manusia**
3. Manajemen sebagai **ilmu (*science*)** dan sebagai **seni (*art*)**

Manajemen secara pengertian dikemukakan oleh follet (dalam saefullah & rnie Tisnawati 2012;5) adalah sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. *Management is the art of getting things through people.*

Menurut Gulick (dalam Fattah 2011;2) manajemen memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki serangkaian teori, meskipun teori itu masih terlalu umum dan subjektif.

Menurut Terry (dalam waldelmi 2018;2) manajemen diartikan sebagai proses yang khas yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

Nickels (dalam saefullah & rnie Tisnawati 2012;6) manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Fungsi-fungsi sebagai mana dijelaskan oleh Nickles & McHugh (dalam saefullah & rnie Tisnawati 2012;8) terdiri dari empat fungsi yaitu:

1. Perencanaan (*planning*)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Pengimplementasian (*directing*)
4. Pengendalian dan pengawasan (*controlling*)

Semenara pada abad pertengahan tahun 1959-an Koontz (dalam Solihin 2009;3)mempopulerkan onsep ungsi-fungsi manajemen dengan mengelompokkan tugas-tugasyang dilakukan oleh manajemen ke dalam lima fungsi manajemen yang mencakup :

1. perencanaan (*planning*)
2. pengorganisaian (*organizing*)
3. pengisian staf (*staffing*)
4. memimpin (*leading*)
5. pengendalian (*controlling*)

4. Konsep Kebijakan Publik

Literature mengenai kebijakan public telah banyak menyajikan berbagai devenisi kebjiaan public, baik dalamartian luas maupun sempit. Dye yang dikutip Young dan Quinn (dalam Suharto 2015;44) memberikan defenisi kebijakan public secara luas, yani sebagai *“whatever governmentschoose to do or notto do”* sementara itu, Anderson yang juga dikutip oleh Young dan Quinn menyampaikan definisi kebijakan public yang relative lebih spesifik, yaitu sebagai *“a purposive course of actionffollowed by an actor set of actors in dealingwitha problemor matter of concern”*

Menurut beberapa ahli istilah kebijakan itu sendiri berbeda-beda, seperti yang disampaikan oleh Suharto (dalam Ali & Raden Imam Al Hafis 2015;4) kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan kepuusan.

Menurut winarno (dalam Hasbullah 2015;58) kebijakan public merupakan kebijakan yang dikembangkanoleh lembaga-lembaga pemerintahan dan pejabat-pejabatpemerintahan yang dipengaruhi oleh aktor-aktor, bukan pemerintah.

Menurut Dye dan James Anderson (dalam Agustino 2014;4) ada tiga alasan yang melatarbelakangi mengapa kebijakan publik perlu dipelajari pertama, pertimbangan atau alasan ilmiah (*scientific reason*). Kedua, pertimbangan atau alasan profesional (*professional reasons*). Ketiga, pertimbangan atau alasan politis (*political reasons*).

Eyestone (dalam agustino 2014;6) mendefenisikan kebijakan publik sebagai hubungan antar unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan

Menurut Dye (dalam Agustino 2014;7) kebijakan public adalah apayang dipilih oleh pemerintah untuk dikejakan atau tidak dikerjakan. Melalui defenisi ini kita mendapatkan pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Rose (dalam agustino 2014;7) pun berupaya mendefenisikan kebijakan public sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dengan memiliki konsekuensibagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Anderson (dalam agustino 2014;7) memberikan pengertian atas defenisi kebijakan public, dalam bukunya *public police making* kebijakan public merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Dalam prakteknya, rentetan kebijakan public sangat banyak. namun secara sederhana dikelompokkan menjadi 3 yaitu seperti yang dikemukakan oleh Nugroho (dalam Ali & Raden Imam Al Hafis 2015;11) :

1. kebijakan public yang bersifat makro atau umum, atau mendasar
2. kebijakan public yang bersifat meso atau menengah atau penjelasan pelaksanaan
3. kebijakan public yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya.

Ada banyak teori yang dikemukakan para ahli yang menjelaskan tentang perumusan kebijakan Negara, termasuk dalam hal ini perumusan kebijakan pendidikan. Namun dalam hal ini Hudson (dalam Hasbullah 2015;71) mengelompokkan teori kebijakan pendidikan kedalam 5 (lima) teori, yaitu ;teori radikal, teori advokasi, teori transaktif, teori sinoptik, dan teori incremental.

4. Konsep Implementasi

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. Menurut Webster’s (dalam Tachjan 2006;23) kata *implement* berasal dari bahasa latin *implementum* dari asal kata “*impre*” dan “*plere*” kata “*impere*” dimaksudkan “*to fill up*”, “*to fill in*” yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi

Implementasi merupakan suatu hal yang krusial dalam studi kebijakan public. Menurut Edwar III (dalam Santosa 2009;41) bahwa implementasi kebijakan adalah *is the stage of policymaking between the establishment of a policy*

Mazmanian & Paul Sabatier (dalam Agustino 2014;139) dalam bukunya *implementation and public policy* mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekulif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mendefenisikan masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan Van meter dan Van horn (dalam Agustino 2014;139) mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan bijaksana.

Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr (dalam Agustino 2014;139) dimana mereka katakana bahwa implementasi sebagai suatu poses dan sebaai suatu hasil. Dan tak jauh berbeda pua sepeti yang diungkapkan oleh Grindle (dalam Agustino 2014;139) bahwasanya pengukuran keberhasilan implementai dapat dilihat dari posesnya, apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu, melihat pada *action* program dari individual projects dan yang ke dua apakah tujuan dari program tersebut tercapai.

Sementara pendapat Ripley (dalam Ali & Raden Imam Al Hafiz 2015;53) implementasi dapat dilihat dari dua perspektif sebagai mana ia jelaskan "*implementation studies have two major foci "compliance" and "whathappening?"*" perspektif pertama memahami keberhasilan implementasi

dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan implementer dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan. Pada perspektif kedua ini memandang bahwa kepatuhan implementer dalam mengimplementasikan kebijakan merupakan suatu kondisi yang harus dilalui agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

5. Konsep Program

Pengertian Program Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Westra (1989:236) mengatakan bahwa “program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya”. Siagian (dalam Westra 1989:124) mengatakan bahwa “penyusunan program adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu”. Lebih lanjut di jelaskan jika suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
4. Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.

5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya, karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri.
6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain lain untuk melaksanakan program tersebut (Bintoro 1987:181).

Ahli lainya, yaitu Jones (1996:295) berpendapat bahwa “program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan”. Lebih lanjut Jones juga menjelaskan bahwa di dalam program dibuat beberapa aspek, yaitu mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk diopersonalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan oleh Korten (dalam Jones 1996:232) bahwa “A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives” atau suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

6. Konsep Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Sasaran utama Program Indonesia Pintar :

- a. Peserta didik pemegang KIP;
- b. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dengan pertimbangan khusus;
- c. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Pelayaran, dan Kemaritiman

Cara menggunakan Program Indonesia Pintar

1. Penerima KIP harus terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal (SD/SMP/SMA/SMK) ataupun non formal (PKBM/SKB/LKP);
2. KIP harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) lembaga pendidikan.

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan variabel penelitian kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi maka penulis akan menjelaskan unsur tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran makna. Adapun untuk melihat Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip), penulis menggunakan konsep George Edward III (dalam Ali & Raden Imam Al Hafis 2015;69) dalam melaksanakan implementasi terdapat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi diantara lain: komunikasi, sumber

daya, disposisi, struktur birokrasi. Untuk menjelaskan hubungan antar variable yang diteliti dengan indikator-indikator yang digunakan, maka disusun kerangka piker seperti berikut ini:

Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip).



Sumber: Modifikasi Penulis, Tahun 2018

C. Hipotesis

Berdasarkan yang telah dijabarkan oleh peneliti pada bab sebelumnya dan diperjelas pada rumusan masalah, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut. Diduga Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip) akan terlaksana apabila terdapat indikator : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur birokrasi dalam pelaksanaannya..

D. Konsep Operasional

Konsep operasional dalam penelitian ini menyangkut bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip)

1. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

4. kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.
5. implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
6. Komunikasi yang baik salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang mencapai sasaran kebijakan tercipta jika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan.
7. Sumber daya merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan menurut Edward III, dalam implementasi kebijakan beberapa indikator yang mengukur sumberdaya diantaranya: *staf, informasi, wewenang, fasilitas*.
8. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan suatu keinginan, kemauan dan kebijakan perubahan kebijakan untuk implementasi tersebut.
9. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau lembaga dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.

E. Oprasional Variabel

Table II.1: Oprasional Variable Penelitian Tentang Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip).

Konsep	Variable	Indikator	Item yang dinilai	Skala
Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 195) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta	Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip).	1. Komunikasi	a. Sosialisasi yang diberikan mengenai program indoneia pintar b. Kejelasan informasi yang diberikan pigak sekolah kepada penerima manfaat program indonesia pintar	- Terlaksana -Cukup terlaksana -Kurang terlaksana
		2. Sumber daya	a. Adanya dukungan sumberdaya manusia yang mendukung berjalannya program indonesia pintar b. Tersedianya sarana serta prasarana yang menunjang pelaksanaan program indonesia pintar a. pemahaman petugas serta	- Terlaksana -Cukup terlaksana -Kurang terlaksana

<p>yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.</p>	<p>3. Disposisi</p>	<p>pengetahuan petugas dalam melaksanakan mekanisme</p> <p>b. penilaian penerima manfaat bantuan program indonesia pintar.</p> <p>a. Para petugas menjalankan tuposinya sesuai dengan uang ditentukan</p> <p>b. Pengawasan petugas dalam menjalankan kebijakan serta pengawasan kebijakan.</p>	<p>- Terlaksana</p> <p>-Cukup terlaksana</p> <p>-Kurang terlaksana</p>
	<p>4. Struktur birokrasi</p>		<p>- Terlaksana</p> <p>-Cukup terlaksana</p> <p>-Kurang</p>

				terlaksana
--	--	--	--	------------

Sumber: modifikasi penulis, 2018

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Linkert*. Skala linkert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena yang terjadi. Dengan skala linkert maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. (sugiono, 2003:107).

Setelah ditemukan konsep-konsep yang bersangkutan dengan penelitian ini, maka penulis menetapkan teknik pengukuran variabel dan indikator variabel kinerja, maka teknik tersebut adalah sebagai berikut:

- Terlaksana : Jika rata-rata penilaian terhadap Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip) dengan ukuran 67%-100% dari jawaban responden
- Cukup terlaksana : Jika rata-rata penilaian terhadap Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip) dengan ukuran 34%-66%

Kurang terlaksana : Jika rata-rata penilaian terhadap Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip) dengan ukuran <34% dari jawaban responden

Adapun untuk indikator kinerja teknik pengukurannya adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Terlaksana : jika rata-rata penilaian responden terhadap Indikator komunikasi mendapat tanggapan baik berada pada ukuran 67%-100% dari jawaban responden

Cukup terlaksana : jika rata-rata penilaian responden terhadap Indikator komunikasi mendapat tanggapan cukup baik berada pada ukuran 34%-66% dari jawaban responden

Kurang terlaksana : jika rata-rata penilaian responden terhadap Indikator komunikasi mendapat tanggapan urang baik berada pada ukuran <34% dari jawaban responden

2. Sumber daya

Terlaksana : jika rata-rata penilaian responden terhadap Indikator sumber daya mendapat tanggapan baik berada pada ukuran 67%-100% dari jawaban responden

Cukup terlaksana : jika rata-rata penilaian responden terhadap Indikator sumber daya mendapat tanggapan cukup baik berada pada ukuran 34%-66% dari jawaban responden

Kurang terlaksana : : jika rata-rata penilaian responden terhadap Indikator sumber daya mendapat tanggapan urang baik berada pada

ukuran <34% dari jawaban responden

3. Disposisi

Terlaksana : jika rata-rata penilaian responden terhadap Indikator disposisi mendapat tanggapan baik berada pada ukuran 67%-100% dari jawaban responden

Cukup terlaksana : jika rata-rata penilaian responden terhadap Indikator disposisi mendapat tanggapan cukup baik berada pada ukuran 34%-66% dari jawaban responden

Kurang terlaksana : jika rata-rata penilaian responden terhadap Indikator disposisi mendapat tanggapan kurang baik berada pada ukuran <34% dari jawaban responden

4. Struktur Birokrasi

Terlaksana : jika rata-rata penilaian responden terhadap Indikator struktur birokrasi mendapat tanggapan baik berada pada ukuran 67%-100% dari jawaban responden

Cukup terlaksana : jika rata-rata penilaian responden terhadap Indikator struktur birokrasi mendapat tanggapan cukup baik berada pada ukuran 34%-66% dari jawaban responden

Kurang terlaksana : jika rata-rata penilaian responden terhadap Indikator struktur birokrasi mendapat tanggapan kurang baik berada pada ukuran <34% dari jawaban responden

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe survei deskriptif yaitu menurut Sugiyono (2012:12) adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Kemudian metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012:8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang dilandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Alasannya metode penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik sehingga dapat dilakukan perhitungan dan interpretasi yang disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel dan pengujian hipotesis sehingga memberikan hasil penelitian yang aktual.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru yang berada di daerah Kecamatan Tenayan Raya, alasan yang mengiring peneliti melakukan penelitian ditempat tersebut adalah untuk melihat sejauh apakah perkembangan dari Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip)

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2012;80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

2. sampel

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili). Karena jika tidak representative, maka ibarat orang buta disuruh menyimpulkan karakteristik.

Dari sampel penelitian diambil dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Kepala sekolah SD 046 Kota Pekanbaru, Staf penanggung jawab KIP serta responden sebanyak 27 orang dari penerima manfaat bantuan Program Indonesia Pintar.

Tabel III 1 : Populasi Dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip).

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Dinas pendidikan kota pekanbaru	1	1	100%
2	Kepala sekolah SD 046 ota Pekanbaru	1	1	100%
3	Staf pengurus KIP SD 046 Kota Pekanbaru	1	1	100%
4	Orang tua murid penerima manfaat PIP	97	27	27%
Jumlah		100	30	-

Sumber :modifikasi penulis,Tahun 2018

D. Teknik penarikan sampel

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel pada implementasi program indonesia pintar melalui kartu indonesia pintar (KIP), dalam hal ini maka digunakan penarikan teknik sensus. teknik sensus menurut Sugiyono (2012;62) yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel. Dimana keseluruhan dari jumlah populasi penulis jadikan sebagai responden yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Kepala sekolah SD 046 Kota Pekanbaru, Staf penanggung jawab KIP, hal ini dikarenakan jumlah populasi yang relative sedikit dan memiliki jam kerja yang lebih jelas sehingga lebih mudah untuk di temui guna pengumpulan data dalam penelitian ini, sementara untuk masyarakat atau orang tua murid penerima

bantuan teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling, menurut sugiyono (2010) teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif, yaitu dengan menetapkan responden sebanyak 27 orang tua murid dari penerima manfaat bantuan Program Indonesia Pintar dan dirasakan cukup mewakili responden yang lainnya.

E. Jenis dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para responden yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan sudah tertulis dalam bentuk dokumentasi dan terkadang juga diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. data ini merupakan data yang sudah diolah oleh badan-badan tertentu. Data yang dipergunakan sepanjang memiliki kaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Data tentang keadaan geografis
 2. Data tentang keadaan penduduk
 3. Data tentang keadaan ekonomi
 4. Dan data lainnya

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut

Sugiyono (2007:209) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, kuisisioner, dan dokumentasi.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

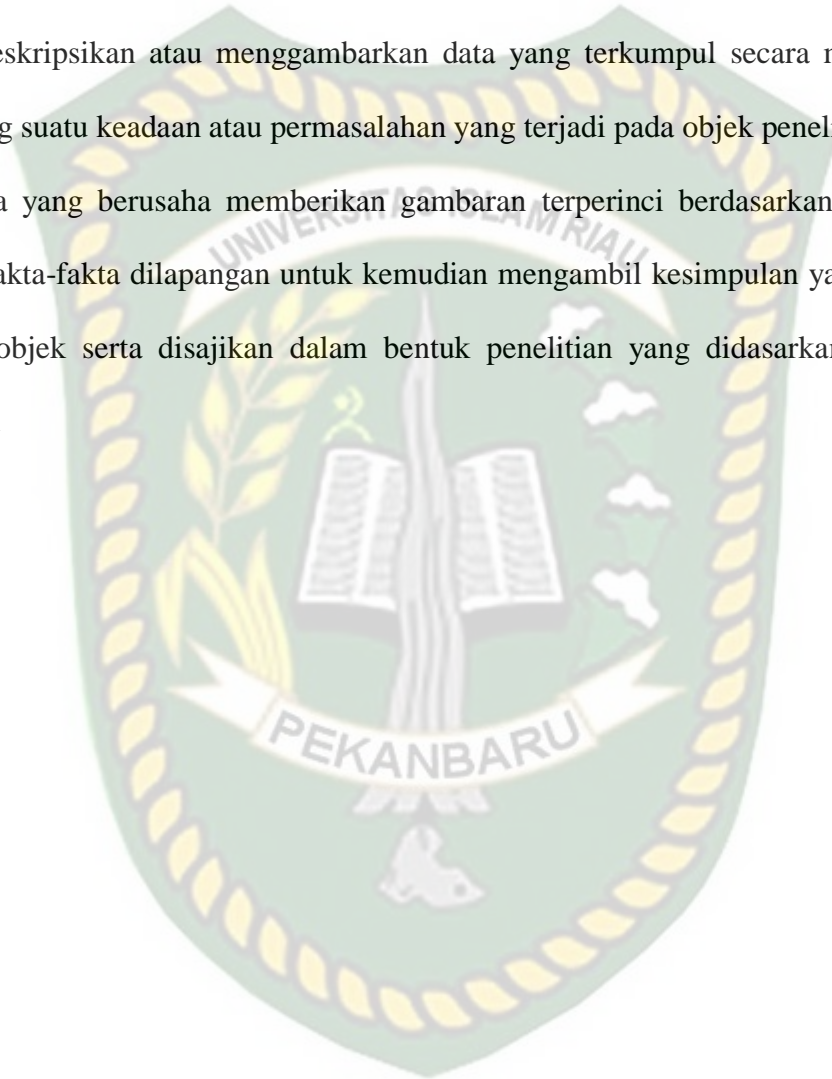
1. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang atau tersamar, yaitu menyatakan terus terang kepada informan bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan penulis juga tidak terus terang atau tersamar dalam melakukan observasi dengan pertimbangan untuk menghindari jika data tentang Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip)
2. kuisisioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya.

G. Teknik analisis data

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah metode statistik deskriptif. menurut sugiyono (2012;147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Teknik analisa ini juga suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian. Suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku pada objek serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas lebih kurang 8.915.016 Ha. Keberadaannya membentang dari lereng bukit barisan sampai dengan Selat Malaka. Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan Negara tetangga dan provinsi ialah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
2. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
4. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara

Jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan data Badan Statistik Provinsi Riau tahun 2010 sebesar 5.543.031 jiwa. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk sebanyak 903.902 jiwa.

Ibu kota di provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, Selat Panjang, Bangkinang, Bengkalis, Bagansiapiapi dan Rengat.

B. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan

Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "**Pekan Baharu**" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut **Pekanbaru**.

Kota Pekanbaru merupakan ibukota provinsi Riau yang terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Kota ini dialiri oleh sungai siak yang mengalir dari barat ketimur dan berada pada ketinggian yang berkisar antara 5-50 meter diatas permukaan laut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/ pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas serta ketertiban dalam pengguna fasilitas umum seperti jalan dan kendaraan, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2013 menjadi 12 Kecamatan yaitu Tampan, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Lima puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, Payung Sekaki, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 kelurahan/desa.

Gambar IV.1 : Peta Geografi Kota Pekanbaru Provinsi Riau



Sumber : BPS Kota Pekanbaru, 2019

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang dengan dominan masyarakatnya bermata pencaharian yaitu berdagang dan dibidang jasa. Strategisnya letak geografis kota Pekanbaru sebagai arus lalu lintas perdagangan nasional maupun internasional menjadikan kota Pekanbaru banyak diminati bagi pendatang untuk melakukan migrasi dan urbanisasi.

Kependudukan

Sejak tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Menurut Badan Pusat Statistik adapun jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2015 ialah 1.011.467 jiwa yang tersebar diseluruh wilayah administrative Kota Pekanbaru.

Adapun pembagian daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Bukit raya
2. Lima puluh
3. Marpoyan damai
4. Payang sekaki
5. Pekanbaru kota
6. Sail
7. Senapelan
8. Sukajadi
9. Rumbai
10. Rumbai pesisir
11. Tampan
12. Tenayan raya

Berikut ini merupakan jumlah distribusi mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2015

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	100.656	93.675	194.231
2.	Payung Sekaki	51.993	47.177	99.170
3.	Bukit Raya	54.628	51.533	106.161
4.	Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
5.	Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
6.	Sail	11.464	11.492	22.956
7.	Sukajadi	24.347	24.989	49.336
8.	Rumbai	37.685	36.011	73.231
9.	Lima Puluh	21.819	22.163	43.182
10.	Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
11.	Senapelan	18.819	19.364	38.183
12.	Rumbai Pesisir	37.685	35.285	72.970
Jumlah		519.515	491.952	1.011.467

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru, 2019

C. Gambaran Umum Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru

1. Profil Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru yang beralamatkan di jalan Lintas Timur Km. 13 RT/RW : 2/2 Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya. Sekolah Dasar ini mulai dibangun pada tahun 1973 dan resmi berizin oprasional mulai tanggal 01 Oktober 1979 hingga sekarang. Kepala Sekolah Dasar Negeri 46 pekanbaru ialah Ibu Nila Wardani, S.Pd, saat ini SD Negeri 46 pekanbaru berada pada akreditasi A.

Ada pun Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran di SD Negeri 46 pekanbaru dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel IV.2 : Sarana dan Prasarana SD Negeri 46 Pekanbaru

No	Jenis Gedung	Jumlah ruang	Keadaan
1	RuangBelajar	14	Baik
2	RuangPustaka	1	Baik
3	RuangPertemuan / Aula PKG	-	Baik
4	WC Murid	10	Baik
5	WC Guru	1	Baik
6	Musholla	1	Baik
7	Kantor / ruangKepalaSekolah	1	Baik
8	Laboratorium	-	Perludiadakan
9	Ruang UKS	1	Baik
10	RuangPramuka	-	Perludiadakan
11	RumahpenjagaSekolah	1	Sedang
12	Kantin	1	Baik
13	Gudang	1	Baik
14	Sumur Bor	1	Baik

Sumber : SD Negeri 46 Pekanbaru

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Mewujudkan SD Negeri 46 Pekanbaru yang berkualitas, tenaga pendidik profesional, siswa unggul dalam akademik dan non akademik, berakhlak mulia, dan mencintai lingkungan.”

b. Misi

1. Meningkatkan kinerja profesional guru dan tenaga kependidikan.
2. Meningkatkan kedisiplinan pendidikan dan peserta didik..
3. Melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
4. Melengkapi sarana dan prasarana sekolah tahap demi tahap.
5. Membina dan mengembangkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler.
6. Membentuk kepribadian warga sekolah yang berbudi pekerti mulia.
7. Menciptakan lingkungan sekolah bersih, indah, tertib, dan aman.

Jumlah murid dari tahun ke tahun cukup bertambah tiap tahunnya, dilihat dari tabel dibawah ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah murid tiap tahunnya.

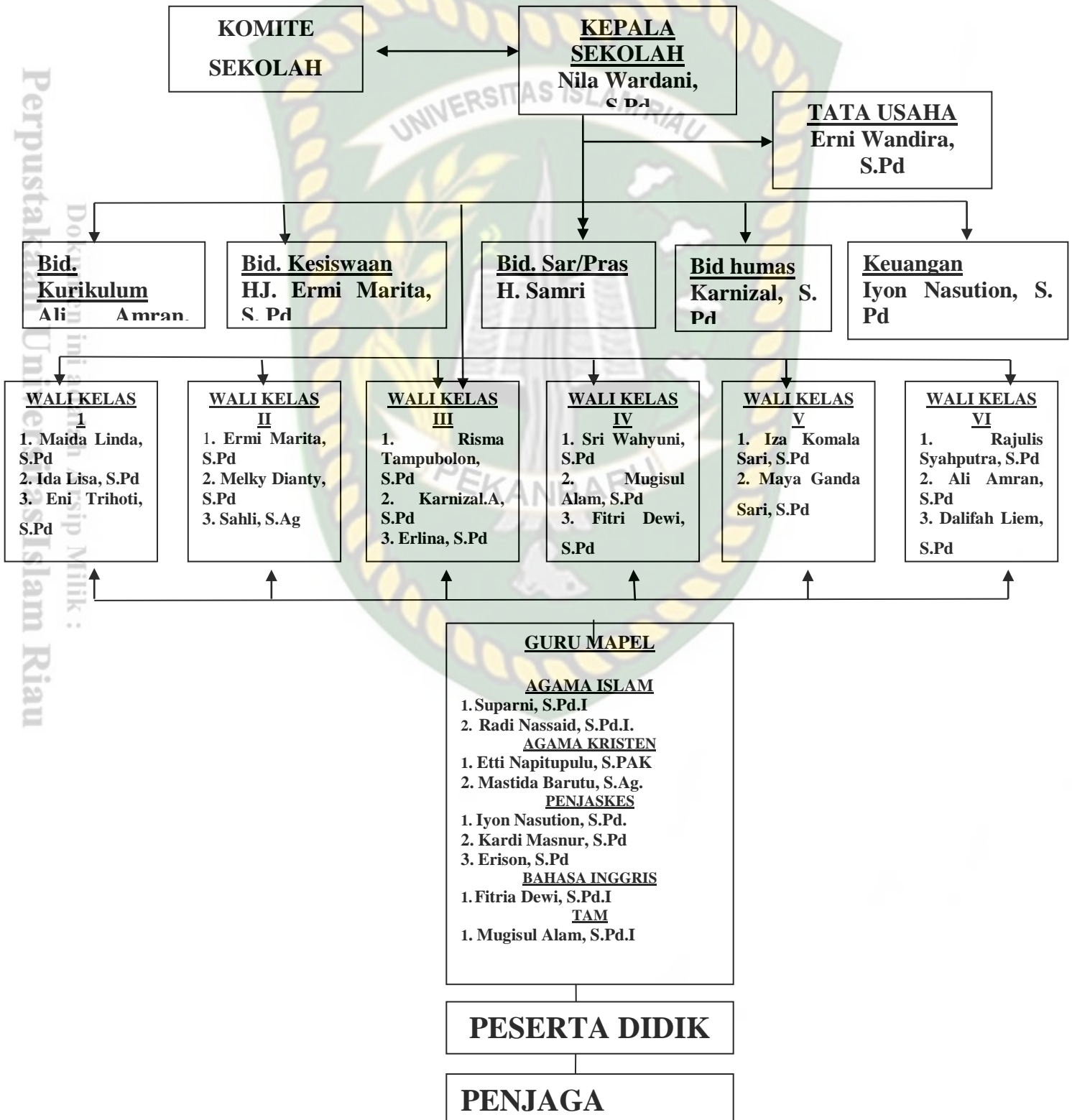
Tabel IV.3 : Jumlah Murid Kelas 1 Sampai Kelas 6 Dari Tahun 2016 Sampai 2019

Tahun Pelajaran	Keadaan Siswa														Jumlah Total
	Kls I		Kls II		Kls III		Kls IV		Kls V		Kls VI		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2016/2017	78	42	65	47	41	35	41	39	66	52	62	51	353	266	619
2017/2018	67	53	79	38	64	45	42	37	42	41	65	63	359	267	626
2018/2019	61	59	62	52	77	42	69	49	43	36	38	44	350	282	632

Sumber : SD Negeri 46 Pekanbaru

Gambar IV.2 Struktur Organisasi SD Negeri 46 Kota Pekanbaru

STRUKTUR ORGANISASI
SD NEGERI 46 PEKANBARU KEC. TENAYANRAYA KOTA
PEKANBARU
TAHUN AJARAN 2018 / 2019
Jln. Lintas Timur KM. 13 Kulim Telp. 0761 7698289



3. Data Guru

Tenaga pengajar yang mengajar di Sekolah Dasar (SD) negeri 46 berjumlah 29 tenaga pengajar dan terdiri dari 10 laki-laki tenaga pengajar dan 19 perempuan tenaga pengajar.

Tabel IV.4 : Tenaga Pengajar atau Guru yang mengajar di SD Negeri Pekanbaru

no	Nama	Status pegawai	Jenis PTK	Gelar Belakang	Jenjang
1	Afrizal	Tenaga Honor Sekolah	Penjaga Sekolah		SMA / sederajat
2	Ali Amran	PNS	Guru Kelas	S.Pd	S1
3	Dalifah Liem	PNS	Guru Kelas	S.Pd	S1
4	Eni Trihoti	Guru Honor Sekolah	Guru Kelas	A.Md, S.Pd	S1
5	Erison	PNS	Guru Mapel	S.Pd	S1
6	Erlina	PNS	Guru Kelas	A.Ma.Pd, S.Pd	S1
7	Ermi Marita	PNS	Guru Kelas	S.Pd	S1
8	ERNI WANDIRA, S.PD	Tenaga Honor Sekolah	Tenaga Administrasi Sekolah	S.Pd	S1
9	Etti Napitupulu	Honor Daerah TK.II Kab/Kota	Guru Mapel	S.Ag	S1
10	Fitria Dewi	Guru Honor Sekolah	Guru Kelas	S.Pd, S.Pd	S1
11	Idalisa	Honor Daerah TK.I Provinsi	Guru Kelas	A.Ma.Pd, S.Pd	S1
12	Iyon Nasution	PNS	Guru Mapel	S.Pd	S1
13	Iza Komala Sari	Guru Honor Sekolah	Guru Kelas	S.Pd	S1
14	Kardi Masnur	Guru Honor Sekolah	Guru Mapel	S.Pd	S1
15	Karnizal A	Honor	Guru Kelas	A.Ma.Pd,	S1

		Daerah TK.II Kab/Kota		S.Pd	
16	Maida Linda	Guru Honor Sekolah	Guru Kelas	A.Ma.Pd, S.Pd	S1
17	Mastida Berutu	Guru Honor Sekolah	Guru Kelas	S.Pd	S1
18	Maya Ganda Sari	PNS	Guru Kelas	A.Ma.Pd, S.Pd	S1
19	Melki Dianti.	PNS	Guru Kelas	A.Ma.Pd, S.Pd	S1
20	Mugisul Alam	Guru Honor Sekolah	Guru Kelas	S.Ag, S.Pd	S1
21	Nesia Laura	Guru Honor Sekolah	Guru Mapel	S.Pd, S.Pd	S1
22	Nila Wardani	PNS	Kepala Sekolah	S.Pd	S1
23	RADI NASSAID	Guru Honor Sekolah	Guru Mapel	S.Pd.I	S1
24	Rajulis Syahputra	PNS	Guru Kelas	S.Pd	S1
25	Risma Tampubolon	PNS	Guru Kelas	A.Md, S.Pd	S1
26	Sahli	Honor Daerah TK.II Kab/Kota	Guru Kelas	S.Ag	S1
27	Sri Wahyuni	PNS	Guru Kelas	A.Ma.Pd, S.Pd	S1
28	Suparni	Guru Honor Sekolah	Guru Mapel	S.Ag	S1
29	YOSNIA DANIS	Guru Honor Sekolah	Guru Mapel	S.Pd	S1

Sumber : SD Negeri 46 Pekanbaru

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian dan dalam mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden, yang terdiri dari KASI bagian Staf kesiswaan SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Bapak Muhammad Sukri S. Kom, Kepala Sekolah Dasar 46 Pekanbaru Ibu Nila Wardani, S.Pd. Sedangkan untuk responden kuisisioner merupakan orang tua murid yang menerima bantuan PIP di SD Negeri 46 Pekanbaru, identitas responden berupa data kuisisioner yang disebarkan oleh penulis yang berisikan keterangan mengenai nama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan umur responden. Melalui kuisisioner yang disebarkan oleh penulis kepada orang tua murid penerima PIP.

1. Tingkat Pendidikan

Guna memperoleh gambaran serta data tentang efektifitas PIP disekolah dasar negeri 46 kota pekanbaru, peneliti melakukan wawancara serta menyebarkan kuisisioner kepada responden yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penyebaran kuisisioner identitas responden sangat dibutuhkan guna memberikan gambaran mengenai identitas responden tersebut.

Pendidikan merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam diri seseorang, karena pendidikan merupakan salah satu tolak ukur yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Dalam penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa tingkatan pendidikan, mulai dari yang terendah sampai menengah atas.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan jenjang pendidikan yang dimiliki seluruh responden responden sangat bervariasi. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1 Jenjang Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	SD	1 orang	3,7%
2	SMP	6 orang	22,2%
3	SMA	20 orang	74,1%
	Jumlah	27 orang	100%

sumber: peneliti lapangan 2019

berdasarkan tabel di atas pendidikan terakhir yang dimiliki oleh responden paling banyak ialah tamatan SMA yaitu sebanyak 20 orang atau sebanyak 74,1 %, kemudiandi susul dengan tamatan SMP sebanyak 6 orang atau 22,2% dan yang terakhir ialah tingkat pendidikan SD yaitu 1 orang sebanyak 3,7%.

2. Kelompok Umur

Usia atau umur merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kedewasaan serta kematangan berpikir seseorang dalam melakukan suatu tindakan dan berpikir. Sebagai penjabaran umur rata-rata dari responden dalam kelompok umur, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel V.2 Jumlah Responden Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase %
1	20-30	1 orang	3,7%
2	31-40	13 orang	48,1%
3	41-50	12 orang	44,4%
4	>50	1 orang	3,7%
	Jumlah	27	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

Berdasarkan tabel responden yang berjumlah 27 dan diklasifikasikan berdasarkan umur diatas dapat dilihat bahwasannya kebanyakan responden berusia antara 31-40 dengan banyak responden 13 orang dengan persentase 48,1% selanjutnya yang paling banyak berusia 41-50 jumlah responden 12 orang dengan persentase 44,4%, sedangkan responden yang berusia 20-30 dan yang berusia >50 masing-masing hanya memiliki 1 orang responden dengan persentase 3,7%.

3. Jenis kelamin

Jenis kelamin responden juga menjadi pertimbangan sebagai identitas responden, jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase%
1	Laki-laki	5	18,5 %
2	Perempuan	22	81,4%
	Jumlah	27	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya dalam pengisian kuisioner peran perempuan lebih dominan dalam menjawab kuisioner dari pada laki-laki, yang dimana jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 22 orang dengan persentase 81,4% sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5 orang dengan persentase 18,5%..

B. Implementasi Program Indonesia Pintar Disekolah Dasar Negeri 046 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Program indonesia pintar merupakan program beasiswa yang diberikan kepada peserta didik aktif. Program ini merupakan program lanjutan dari BSM yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan siswa/warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar (PKBM)/ lembaga kursus dan pelatihan dari rumahtangga/ keluarga dengan status ekonomi terendah secara nasional.

Program Indonesia pintar merupakan program pemerintah dengan memberikan bantuan uang tunai kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia pintar ini bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan (sekolah,

sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya atau balai latihan kerja).

Besaran dana PIP diberikan per peserta didik, adalah sebagai berikut:

Sekolah Dasar (SD)/Paket A:

- e. Peserta didik Kelas I, II, III, IV dan V Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00;
- f. Peserta didik Kelas VI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00;
- g. Peserta didik Kelas II, III, IV, V dan VI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00
- h. Peserta didik Kelas I Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00p

Pemanfaatan Dana PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik di sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya, untuk pemanfaatan sebagai berikut:

7. Membeli buku dan alat tulis;
8. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
9. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
10. Uang saku peserta didik;
11. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; Biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal

Untuk menilai bagaimana implementasi program indonesia pintar di sekolah dasar negeri 46 kota pekanbaru melalui kartu indonesia pintar (KIP) diperlukan indikator-indikator yang menjadi tolakukur penilaian, adapun indikator yang menjadi tolak ukur penilaian tersebut ialah:

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu cara untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, bisa dikatakan komunikasi merupakan aspek terpenting dalam menjalankan suatu organisasi. Komunikasi dapat juga diartikan sebagai proses dimana sekelompok orang yang berada dalam suatu lingkup organisasi atau masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan yang ada. Komunikasi yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Dalam program indonesia pintar lembaga atau dinas yaitu Dinas Pendidikan Kota pekanbaru yang menaungi keberlangsungan program ini menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bertanggung jawab untuk meneruskan surat keputusan kepada penerima dana PIP ke tiap-tiap sekolah dasar yang ada di kota pekanbaru yang untuk selanjutnya akan diteruskan oleh pihak sekolah memberikan informasi kepada murid yang mendapatkan Dana bantuan tersebut.

Seperti wawancara yang dilakukan peneliti pada (09/04/2019) bersama kepala sekolah SD negeri 46 Kota Pekanbaru ibu Nila Wardani, S.Pd, beliau menyampaikan bahwa:

“untuk pendataan penerima pip akan disampaikan oleh dinas pendidikan langsung ke sekolah, biasanya berupa data anak penerimapi dan kemudian nantinya akan diteruskan oleh kesekolah sendiri untuk menyampaikan kepada murid-murid yang menerima PIP agar membawa kelengkapan berkas yang berupa KK serta membawa orrang tua untuk menerima surat terusan untuk dibawa pada saat pencairan dana ke BANK”

Menyambung dari hasil wawancara sebelumnya yang peneliti lakukan bersama Kepala Sekolah SD Negeri 46 Pekanbaru, hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Sukri S. Kom selaku Staf Bidang Kesiswaan SD dalam wawancara pada (15/05/2019), beliau menyampaikan bahwa :

“untuk sosialisasi kemasyarakat itu tidak dilakukan oleh dinas pendidikan kota pekanbaru, melainkan dinas pendidikan kota pekanbaru hanya menerima usulan yang diterima sebelumnya dari Dinas sosial dan juga usulan anak yang berhak menerima PIP dari sekolah-sekolah apa bila ada. Untuk sosialisai sendiri dapat dilakukan oleh tiap-tiap sekolah sebagaimana yang ditetapkan pada JUKLAK PIP dimana dikatakan bahwa salah satu peran sekolah adalah mensosialisasikan serta mengkoordinasikan PIP keseluruh warga sekolah yang ada”

Untuk mengetahui implementasi kebijakan program Indonesia Pintar di SD Negeri 46 kota pekanbaru berdasarkan respon dari masyarakat peneliti telah menyebarkan kuisioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai komunikasi yang hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4 Tanggapan Dari Responden yaitu Orang Tua Murid Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar Mengenai Komunikasi Dalam Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Apakah SD 46 Pekanbaru Melakukan Sosialisasi PIP	2 (7,4%)	10 (37,1%)	15 (55,5%)	27 (100%)
2	Bagaimana Sosialisasi PIP Di SD 46 Kotapekanbaru	4 (14,8%)	9 (33,3%)	14 (51,8%)	27 (100%)
3	Tanggapan Mengenai Informasi Yang Diberikan Pihak SD 46 Pekanbaru.	5 (18,5%)	10 (37,1%)	12 (44,4%)	27 (100%)
4	Kejelasan Informasi Yang Disampaikan Pada Saat Sosialisasi	6 (22,2%)	10 (37,1%)	11 (40,7%)	27 (100%)
	Jumlah	17	39	52	108

NO	Itempenilaian	Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	Jumlah
	Rata-Rata	4,25	9,75	13	27
	Persentase	37,1%	36,1%	48,14%	100%
	Standar Pengukuran	34%-66%			
	Kriteria	Cukup Terlaksana			

Sumber : Data olahan peneliti 2019

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden dari penerima PIP sebanyak 27 responden mengenai komunikasi yang berupa Sosialisasi maupun tanggapan mengenai kejelasan informasi yang diperoleh mereka dari pihak SD 46 Kota Pekanbaru sebanyak 48,14% persentasi responden mengatakan kurang terlaksana yang dalam artian komunikasi yang dibangun untuk Program Indonesia Pintar cukup terlaksana, hal ini dapat dilihat dari rata-rata jawaban yang disampaikan oleh responden atau orang tua murid.

Komunikasi yakni, sekelompok orang atau beberapa orang, organisasi atau masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi yang terjadi dapat berupa sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses pemahaan akan nilai, ataupun suatu aturan yang akan dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pihak SD Negeri 46 Kota Pekanbaru kurang memahami alur dari program ini, hal ini ditunjukkan dari jawaban yang didapat peneliti bedasarkan kuisoner yang menunjukkan bahwa staf kuang memahami atau mengetahui informasi mengenai alur program ini.

Sumber daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya dapat berupa fisik dan non fisik. Sumber daya merupakan salah satu bagian terpenting dalam menjalankan

kebijakan menurut Edward III dalam implementasi kebijakan beberapa indikator yang mengukur sumber daya antara lain: *staf, informasi, wewenang dan fasilitas*.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sumber daya merupakan salah satu aspek pendorong berjalannya suatu program yang di usung, sumber daya dapat dikelompokkan menjadi sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya keuangan, sumber daya informasi. Berdasarkan aspek penilaian yang akan di nilai dari sumber daya ini ialah sumber daya manusia berupa staf, sumber daya material merupakan sarana dan prasarana, sumber daya informasi berupa informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sumber daya utama dalam suatu kebijakan ialah *staf*, dalam menjalankan program PIP tentunya tiap-tiap sekolah memerlukan salah satu ahli yang dapat mengerti tentang proram yang dijalankan tersebut, hal ini dilakukan untuk menunjang keberlangsungan serta kelancaran program yang dijalankan tersebut. Terkhusus untuk sekolah yang peneliti teliti yaitu SD negeri 46 Kota Pekanbaru telah menyediakan *staf* khusus yang menangani program PIP ini, yaitu bapak Kardi Masnur, S.Pd (12/04/2019). beliau sudah mengemban jabatan ini sejak program PIP mulai dijalankan di SD Negrei 46 Kota Pekanbaru. Menurut wawancara yang dilakukan peneliti bersama beliau tentang Program ini bahwasannya:

“saya sudah memegang jabatan ini dimulai saat progam ini dijalankan disekolah kita ini. Saya yang mengimput data anak ke DAPODIK untuk kemudian diteruskan ke Dinas Pendidikan”

melalui respon yang berupa jawaban quisoner yang panaliti sebarakan yang dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel V.5 Tanggapan Dari Responden yaitu Orang Tua Murid Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar Mengenai Sumber Daya Dalam Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Apakah Di SD 46 Pekanbaru Menyediakan Guru Atau Staf Khusus Yang Menangani PIP	4 (14,8%)	5 (18,5%)	18 (66,6%)	27 (100%)
2	Tanggapan Dari Pihak SD 46 Pekanbaru Dalam Memberikan Arahan Atau Menanggapi Keluhan.	5 (18,5%)	10 (37,1%)	12 (44,4%)	27 (100%)
3	Apakah SD 46 Pekanbaru Menyediakan Sarana Dan Prasarana Dalam Menjalankan PIP	6 (22,2%)	10 (37,1%)	11 (40%)	27 (100%)
4	Bagaimana Sarana Dan Prasarana Yang Disediakan.	8 (29,6%)	9 (33,3%)	10 (37,1%)	27 (100%)
	Jumlah	23	34	51	108
	Rata-Rata	5,75	8,5	12,7	27
	Persentase	21,2%	31,4%	47,2%	100
	Standar Pengukuran	34%-66%			
	Kriteria	Cukup terlaksana			

Sumber : data olahan peneliti 2019

Melihat dari tanggapan masyarakat atau orang tua murid yang menerima bantuan tersebut banyak yang tidak mengetahui keberadaan staf yang mengurus program ini, seperti tanya jawab yang peneliti lakukan bersama Salah satu orang tua murid ibu S Manurung ketika menyebarkan kuisioner (01/04/2019), beliau mengatakan:

“kalo untuk staf yang mengurus PIP kami orang tua yang menerima bantuan banyak yang tidak tau itu siapa yang mengurus, karena kalau kami datang ke

sekolah kami dilayani sama petugas TU, jadi kami tidak tau menahu kalau ada staf yang khusus mengurus PIP ini”

Melihat jawaban yang dipaparkan oleh ibu S Manurung dapat mewakili jawaban dari orang tua murid lain bahwasannya hampir semua orang tua banyak yang tidak mengetahui keberadaan staf atau petugas tersebut.

Sumber daya merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh suatu material atau unsur tertentu dalam kehidupan. Berdasarkan aspek yang dinilai peneliti dalam penelitian ini ialah sumber daya manusia ialah *staf*, sumber daya informasi ialah informasi yang dibutuhkan dan sumberdaya material yang merupakan sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir sebagian masyarakat atau orang tua murid tidak mengetahui bahwa sekolah telah menunjuk salah satu guru yang merangkap menjadi staf pengurus PIP hal ini tentu membuat masyarakat menjadi kebingungan karena staf TU yang biasa mereka temui untuk meminta surat tidak mengetahui jelas alur program ini, hal ini tentu menjadi salah satu keluhan terkait program ini.

Berdasarkan tabel V.6 diatas dapat diketahui bahwa rekapitulasi tanggapan mengenai respon masyarakat tentang sumber daya berada pada kriteria kurang terlaksana, hal ini dapat dilihat pada hasil jawaban yang diperoleh dari masyarakat, rata-rata masyarakat menilai item sumber daya Cukup terlaksana dengan melihat jawaban persentase 47,2%, sementara yang menjawab terlaksana hanya 21,2 %

Disposisi

Disposisi dalam artian luas dapat diartikan kemampuan mempengaruhi atau menanggung sesuatu. Disiposisi juga dapat diartikan sebagai suatu sikap yang

condong melakukan sesuatu dengan cara yang tertentu dan tersistem. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa:

”jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kebijakan tersebut”

Tabel V.6 Tanggapan Dari Responden yaitu Orang Tua Murid Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar Mengenai Disposisi Dalam Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemahaman Tugas Serta pemahaman Mengenai PIP	7 (25,9%)	10 (37,1%)	10 (37,1%)	27 (100%)
2	Bagaimana Pemahaman Pihak Bank Sebagai Pihak Swasta.	2 (7,40%)	17 (62,9%)	8 (29,6%)	27 (100%)
3	Bagaimana Tanggapan Orang Tua Mengenai Implementasi PIP	5 (18,5%)	13 (48,1%)	9 (33,3%)	27 (100%)
4	Apakah PIP Dapat Membantu Kebutuhan Anak Penerima Bantuan.	4 (14,8%)	16 (59,2%)	7 (25,9%)	27 (100%)
	Jumlah Item penilaian	18 terlaksana	56 Cukup terlaksana	34 Kurang terlaksana	108 Jumlah
	Rata-Rata	4,5	14	8,5	27
	Persentase	16,6%	51,8%	31,48%	100%
	Standar Pengukuran	34%-66%			
	Kriteria	Cukup terlaksana			

sumber:Data olahan peneliti 2019

Berdasarkan tabel V.6 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang merupakan orang tua penerima bantuan PIP ada sebanyak 27 orang yang dijadikan responden. Dari 27 orang responden kebanyakan menjawab cukup terlaksana dengan persentase 51, 8%. Dengan persentase yang mengarah pada kriteria cukup terlaksana ini menunjukkan bahwa dari pertanyaan yang peneliti sediakan terkait disposisi yang mencakup tanggapan orang tua tentang PIP serta bagaimana pemahaman petugas yang mengatur jalannya PIP di SD 46 Kota Pekanbaru menunjukkan jawaban yang kurang berkenan di hati responden. Hal ini di perkuat dengan tanya jawab singkat yang peneliti lakukan dengan salah satu orang tua penerima bantuan PIP yaitu ibu S. Manurung pada saat penyebaran quisoner (01/04/2019), beliau mengatakan bahwasannya:

“petugas yang memberikan arahan untuk pip itu banyak tidak taunya, kami orang tua bertanya tentang pencairan dana anak kami yang namanya tidak keluar kepada mereka, namun mereka hanya menjawab tidak tahu.”

Hal ini justru berbanding terbalik dengan tanggapan yang diberikan oleh kepala sekolah Ibu Nila Wardani, S.Pd (09/04/2019) ketika memberikan wawancara kepada peneiti, beliau menyampaikan bahwa:

“banyak yang tidak mengetahui keberadaan petugas PIP tidak masalah, asalkan kerja petugas yang membantu pip itu mengerti tugas dan tanggung jawabnya, serta dapat memenuhi pertanyaan dari orang tua murid”

Pernyataan dari kepala sekolah tentunya berbanding terbalik dengan pernyataan yang di berikan orang tua murid.

Disposisi merupakan sikap yang condong melakukan sesuatu dengan cara yang tertentu dan tersistem. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui

bahwa pemahaman petugas dalam memberikan informasi kepada masyarakat masih kurang. Hal ini disebabkan karena adanya keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa petugas yang memberikan informasi tentang PIP masih kurang memahami tentang program ini.

Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan belum dapat berjalan efektif bila masih ada ketidakefisienan struktur birokrasi, struktur birokrasi itu sendiri mencakup aspek yang didalamnya terdapat struktur birokrasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit-unit organisasi dan sebagainya.

Implementasi yang bersifat kompleks akan menuntut adanya kerjasama antara pihak satu dengan pihak lain. Pada saat struktur birokrasi tidak kondusif terhadap suatu implementasi dalam kebijakan, maka hal ini akan menghambat ketidakefisienan dan menghambat jalannya pelaksanaan suatu kebijakan.

Tabel V.7 Tanggapan Dari Responden yaitu Orang Tua Murid Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar Mengenai Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Apakah pihak penanggung jawab pip di SD sudah menjalankan tugas sesuai tupoksi	16 (59,2%)	10 (37,1%)	1 (3,7%)	27 (100%)
2	Bagaimana TUPOKSI yang dijalankan oleh penanggung jawab pip	18 (66,6%)	5 (18,5%)	4 (14,8%)	27 (100%)
3	Bagaimana pengawasan yang diberikan pihak yang bertanggung jawab di	16 (59,2%)	6 (22,2%)	5 (18,5%)	27 (100%)

NO	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	jumlah
	SD 46pekanbaru guna kebelangsunan PIP				
4	Bagaimana menurut bapak/ibu menilai pengawasan akan dana yang diterima anak penerima bantuan	15 (55,5%)	8 (29,1%)	4 (14,8%)	27 (100%)
	Jumlah	65	29	14	108
	rata-rata	16,2	7,2	3,5	27
	Persentase	60,1%	26,8%	12,9%	100%
	standar pengukuran	34%-66%			
	Kriteria	Cukup Terlaksana			

Sumber : data olahan peneliti 2019

Berdasarkan tabel V.7 diatas dapat diketahui tanggapan responden dari para orang tua murid yang menerima bantuan PIP mengenai Struktur Birokrasi dalam Implementas Program Indonesia Pintar di Sd Negeri 46 Kota pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 27 orang yang dijadikan responden, sebanyak 60,1% persentase masyarakat menyatakan Cukup Terlaksana atau rata-rata sebanyak 16,2 orang yang menjadi responden menyatakan bahwa Struktur Biokrasi dalam aspek penilaian tanggung jawab yang sudah Cukup dilaksanakan sesuai dengan TUPOKSI serta pengawasan terhadap dana yang diterima sudah terlaksana dengan baik.

Hal ini di dukung dengan jawaban yang diberikan oleh bapak kardi (12/04/2019) selaku staf atau petugas yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program PIP di SD 46 Kota Pekanbaru.

“untuk pengawasan terhadap dana memang kita tidak memantau secara langsung apa orang tua murid beli untuk keperluan sekolah si anak, namun kami akan memantau apa saja yang kurang terhadap si anak, seumpama sianak

membutuhkan seragam baru, maka kami akan memberi tau si anak agar mengingatkan orang tua untuk membeli seragam baru, seperti itu.”

Struktur birokrasi sendiri mencakup aspek yang didalamnya terdapat struktur birokrasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit-unit organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah sudah menjalankan pengawasan terhadap dana yang diterima oleh murid. Hal ini didukung dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh orang tua murid pada saat penyebaran kuisioner yaitu, pihak sekolah akan mengingatkan orang tua untuk terlebih dahulu membelikan perlengkapan murid terlebih dahulu, seperti seragam, sepatu, tas, atau buku LKS.

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara yang peneliti paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya dalam Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Indonesia Pintar di SD 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dikatakan Terlaksana.

Tabel V.8 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Implementasi Program Indonesia Pintar Di SD 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Komunikasi	4,25 (37,1%)	9,75 (36,1%)	13 (48,14%)	27 (100%)
2	Sumber Daya	5,75 (21,2%)	8,5 (31,4%)	12,7 (47,2%)	27 (100%)
3	Disposisi	4,5 (16,6%)	14 (51,8%)	8,5 (31,48%)	27 (100%)
4	Struktur Birokrasi	16,2 (60,1%)	7,2 (26,8%)	3,5 (12,9%)	27 (100%)

Jumlah	30,7	39,4	37,7	108
Rata-Rata	7,67	9,85	9,42	27
Persentase	28,4%	36,4%	34,9%	100
Standar Pengukuran	34%-66%			
Kriteria	Cukup terlaksana			

Sumber : data olahan peneliti 2019

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat diketahui bahwa rekapitulasi tanggapan responden mengenai implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 27 orang yang dijadikan responden memberikan tanggapan bahwa sebanyak 9,85 orang menjawab Cukup Terlaksana bila dipersentasekan sebanyak 36,4%, pada kriteria tidak terlaksana di jawab sebanyak 9,42 orang dengan persentase 34,9% sedangkan untuk kriteria terlaksana rata-rata responden yang menjawab sebanyak 7,67 orang dengan persentase 28,4%.

Dari hasil rekapitulasi responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dinyatakan **Cukup Terlaksana**, dengan hasil rekapituasi tanggapan responden rata-rata sebanyak 9,85 orang atau 36,4%, hal ini diihat dari item penilaian yang telah peulis tetapkan yaitu *komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam penilaian komunikasi dapat dikatakan cukup terlaksana dengan hasil persentase 43,5% dengan rata-rata responden yang menjawab sebanyak 11,75 orang
2. Untuk penilaian sumber daya hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar berada pada cukup terlaksana dengan persentase 47,2 % dan dengan rata-rata jawaban yang diberikan oleh 12,7 responden.
3. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam penilaian disposisi menunjukkan persentase jawaban 51,8% dengan rata-rata jawaban yang diberikan sebanyak 14 responden dengan ini dapat dikatakan bahwa cukup terlaksana.

4. Untuk penilaian STRUKTUR BIROKRASI hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sekolah Dasar Negeri 46 Kota Pekanbaru Melalui Kartu Indonesia Pintar berada pada kriteria terlaksana, ini dapat dilihat dari hasil persentase 60,1% yang di ambil dari jawaban responden rata-rata sebanyak 16,2 orang. Penilaian struktur birokrasi ini berada pada kriteria Cukup Terlaksan.

B. Saran

1. Melihat indikator komunikasi diharapkan pihak SD Negeri 46 Kota pekanbaru harus lebih teliti lagi dalam memberikan informasi serta lebih responsif terhadap masyarakat atau orang tua murid untuk memberikan informasi mengenai PIP
2. Untuk indikator sumber daya diharapkan agar pihak SD Negeri 46 Kota Pekanbaru dapat menjelaskan secara detail kepada masyarakat atau orang tua penerima bantuan PIP tentang keberadaan petugas yang mengurus PIP agar masyarakat tidak bingung apabila ada informasi yang tidak dimengerti.
3. Untuk indikator disposisi diharapkan agar pihak SD Negeri 46 Kota Pekanbaru lebih memahami tugasnya tentang program ini, agar pada saat masyarakat atau orang tua penerima PIP mengajukan pertanyaan, mereka dapat menjawab serta mengarahkan orang tua murid.
4. Melihat indikator Struktur Birokrasi yang berada pada kriteria terlaksana ini dapat dikatakan bagus, namun ini bukan menjadi akhir untuk tidak meningkatkan lagi kualitas kerja petugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2015. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ali Zaini, Raden, *Teori Kebijakan Publik*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.
- Fattah, Nanang. 2011. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hasbulah. 2015. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: salemba Humanika
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Public*. Jakarta: Rajawali.
- Makmur, H. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Priansa, Donni Juni & Agus Garnida. 2015. *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabeta
- Santoso, Pandji. 2009. *Administrasi Public Teori Dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Askara
- Siagian, Sondang P, 2008. *Filsafat Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2015. *Analisis Kebijakan Public*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana

- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Erlangga
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Public*. Bandung: AIPI Bandung.
- Tim Penyususn. 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Badan Penerbit FISIPOL UIR.
Pekanbaru:
- Waldemi, Idel & Afvan Aquino. 2018. *manajemen syariah*. Pekanbaru: Unilak
Press
- Yussa, Tarmizi & Hendry Andry.2015. *Perilaku Etika Administrasi Public*.
Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Zulkifli. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press
- Zulkifli & Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Marpoyan Tujuh Publishing.
Pekanbaru.

DOKUMENTASI

- Permendikbud No. 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar.
- Peraturan Bersama Antar Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dan
Direktur Jendral Pendidikan Anak Uia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Nomor: 07/ D/Bp/ 2017 dan Nomor: 02/ Mpk. C/Pm/ 2017 Tentang Petunjuk
Pelaksana Program Indonesia Pintar.
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
:05/D/Bp/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Permendiknas Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya pada
Satuan Dasar dan Menenga

PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

